

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Deskripsi Data**

**4.1.1. Data Dan Sampel**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah di Lampung selama tahun 2020-2022. Data bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Populasi penelitian ini ialah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Lampung dengan periode 3 tahun yaitu tahun 2020-2022. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini diperlukan teknik atau metode dalam pengambilan sampel. Sampel diambil menggunakan purposive sampling. Berikut merupakan rincian sampel yang diperoleh :

**Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel**

Laporan keuangan kab/kota se-Provinsi Lampung tahun periode 2020-2022 (15 kab/kota x 3 tahun)	45
Laporan keuangan tahunan kab/kota se-Provinsi Lampung yang tidak dapat diakses dari sumber data	0
Laporan keuangan tahunan kab/kota se-Provinsi Lampung yang tidak tersedia dari sumber data yang digunakan (DJPK)	0
<b>Jumlah Laporan Keuangan lengkap</b>	<b>45</b>

*Sumber : Data sekunder diolah, 2024*

Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Lampung pada tahun 2020-2022 berjumlah 15 Kabupaten/Kota. Sedangkan, jumlah seluruh sampel selama 3 periode yaitu tahun 2020-2022 sebanyak 45 sampel. Jadi, total sampel yang dapat diolah dari LKPD yang lengkap ada sebanyak 45 sampel.

#### 4.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel independen pada penelitian ini yaitu rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah. Sedangkan, variabel dependen pada penelitian ini yaitu kinerja keuangan daerah.

#### 4.2. Hasil Analisis Data

##### 4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data atau membuat ringkasan data dalam analisis data. Statistik deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rasio Kemandirian Daerah	45	.02	.43	.1300	.11320
Efektivitas PAD	45	.22	1.26	.8993	.24259
Pengelolaan Belanja Daerah	45	.92	1.06	.9858	.03115
Kinerja Keuangan Daerah	45	.89	1.00	.9631	.02512
Valid N (listwise)	45				

*Sumber : Olah Data SPSS Ver 20, 2023*

Pada tabel 4.2 hasil dari uji statistik deskriptif menyatakan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan seluruh Kab/Kota di Lampung selama 3 periode dari 2020-2022. Berikut ini penjelasan dari hasil statistik deskriptif :

1. Variabel X1 dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah memiliki nilai minimum sebesar 0,02 dengan nilai maximum yaitu 0,43. Rata-rata pada rasio kemandirian keuangan daerah adalah 0,1300 mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi

Lampung masih sangat rendah karena kurang dari 25% dengan pola hubungan Instruktif. Standar deviasi dari rasio kemandirian keuangan daerah adalah 0,11320.

2. Variabel X2 dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah diperoleh dari penerimaan pemerintah daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah yang dikelola sehingga menghasilkan penerimaan daerah. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Lampung pada periode 2020-2022 memiliki nilai minimum sebesar 0,22 dengan nilai maximum yaitu 1,26. Sedangkan rata-rata pada rasio efektivitas keuangan daerah adalah 0,8993. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung yaitu kurang efektif karena rata-rata ada diantara 75-89%. Standar deviasi dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah adalah 0,24259.
3. Variabel X3 dalam penelitian ini adalah rasio pengelolaan belanja daerah memiliki nilai minimum sebesar 0,92 dengan nilai maximum yaitu 1,06. Rata-rata pada rasio pengelolaan belanja daerah adalah 0,9858 mengungkapkan bahwa tingkat efisiensi belanja daerah di Provinsi Lampung yaitu kurang efisien karena sudah mencapai angka 90% - 100. Standar deviasi dari rasio efisiensi belanja daerah adalah 0,03115.
4. Variabel Y dalam penelitian ini adalah rasio kinerja keuangan daerah memiliki nilai minimum 0,89 dengan nilai maximum 1,00. Rata-rata pada rasio kinerja keuangan daerah adalah 0,9631 mengungkapkan bahwa rasio kinerja keuangan daerah di Provinsi Lampung yaitu kurang efisien karena rata-rata 90% - 100%. Standar deviasi dari rasio kinerja keuangan daerah adalah 0,02512.

#### **4.2.2. Statistik Inferensial Spesifikasi Model (Regresi Linier Berganda)**

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen/variabel bebas (X) terhadap variabel dependen/variabel terikat (Y). Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program SPSS 20 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.924	.110		8.424	.000		
Rasio Kemandirian Daerah	-.026	.031	-.118	-.856	.397	.980	1.020
<sup>1</sup> Efektivitas PAD	-.046	.014	-.448	3.252	.002	.989	1.011
Pengelolaan Belanja Daerah	.086	.111	.107	.773	.444	.989	1.011

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah  
 Sumber : Olah Data SPSS Ver 20, 2023

$$KKD = 0,924 + -0,026RKD + -0,046EPAD + 0,086PBD + e$$

Berdasarkan hasil persamaan diatas terlihat bahwa:

1. Apabila nilai rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio pengelolaan belanja bersifat konstan ( $X_1, X_2, X_3 = 0$ ), maka tingkat kinerja keuangan daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,924.
2. Apabila nilai rasio kemandirian daerah ( $X_1$ ) dinaikan sebanyak 1x dengan rasio efektivitas PAD dan rasio pengelolaan belanja daerah bersifat konstan ( $X_2, X_3 = 0$ ), maka kinerja keuangan daerah (Y) akan menurun sebesar -0,026.
3. Apabila nilai rasio efektivitas PAD ( $X_2$ ) dinaikan sebanyak 1x dengan rasio kemandirian daerah dan rasio pengelolaan belanja daerah bersifat konstan ( $X_1, X_3 = 0$ ), maka kinerja keuangan daerah (Y) akan menurun sebesar -0,046.
4. Apabila nilai rasio pengelolaan belanja daerah ( $X_3$ ) dinaikan sebanyak 1x dengan rasio kemandirian daerah dan rasio efektivitas PAD bersifat konstan ( $X_1, X_2 = 0$ ), maka kinerja keuangan daerah (Y) akan menurun sebesar 0,086.

#### 4.2.3. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *kolmogorov-smirnov* dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika nilai sig < 0.05 maka data tidak berdistribusi secara normal.
2. Jika nilai sig > 0,05 maka data berdistribusi secara normal.

Hasil dari uji normalitas dapat dengan tabel berikut ini:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.02202658
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.614
Asymp. Sig. (2-tailed)		.846

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Olah Data SPSS Ver 20, 2023

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *kolmogorov-smirnov*. Hasil dari uji normalitas dengan metode *kolmogorov-smirnov* telah di cantumkan pada kolmo diatas, menunjukkan bahwa *kolmogo* signifikan *kolmogorov-smirnov* sebesar 0,846. Dengan hasil yang telah diperoleh tersebut maka dapat dilihat bahwa angka signifikan (*sig*) untuk *kolmogor* dependen pada uji *kolmogorov-smirnov* diperoleh 0,846 > 0,05 artinya data sampel terdistribusi secara normal.

#### 4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam model regresi melalui uji Durbin Waston (*DW test*) memiliki syarat sebagai berikut:

1. Jika d lebih kecil atau lebih besar dari (4-du) maka hipotesis nol ditolak

2. Jika  $d$  terletak diantara  $d_u$  dan  $(4-d_u)$ , maka hipotesis nol diterima yang artinya tidak ada autokorelasi
3. Jika  $d$  terletak diantara  $d_l$  dan  $d_u$  diantara  $(4-d_u)$  dan  $4(-d_l)$  maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
					1	.481 <sup>a</sup>	.231	.175	.02282	

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Belanja Daerah, Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Olah Data SPSS Ver 20, 2023

Hasil uji autokorelasi pada tabel diatas menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 2.236. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai  $d$  terletak diantara  $d_u$  dan  $(4-d_u)$ . Dimana  $2.338 > 2.236 > 1.6662$ . maka berarti bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.2.5. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antara sesama variabel independen, dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai tolerance  $> 0,01$  maka tidak ada multikolinieritas diantara variabel independennya.
2. Jika nilai VIF lebih dari 10 atau nilai tolerance  $< 0,01$  maka menunjukkan adanya multikolinieritas diantara variabel independennya

**Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	.924	.110				8.424
Rasio Kemandirian Daerah	-.026	.031	-.118	-.856	.397	.980	1.020
<sup>1</sup> Efektivitas PAD	-.046	.014	-.448	3.252	.002	.989	1.011
Pengelolaan Belanja Daerah	.086	.111	.107	.773	.444	.989	1.011

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Olah Data SPSS Ver 20, 2023

Berdasarkan uji multikolinieritas yang telah dilakukan maka diperoleh hasil yang telah di cantumkan pada tabel diatas. Maka dapat di simpulkan bahwa:

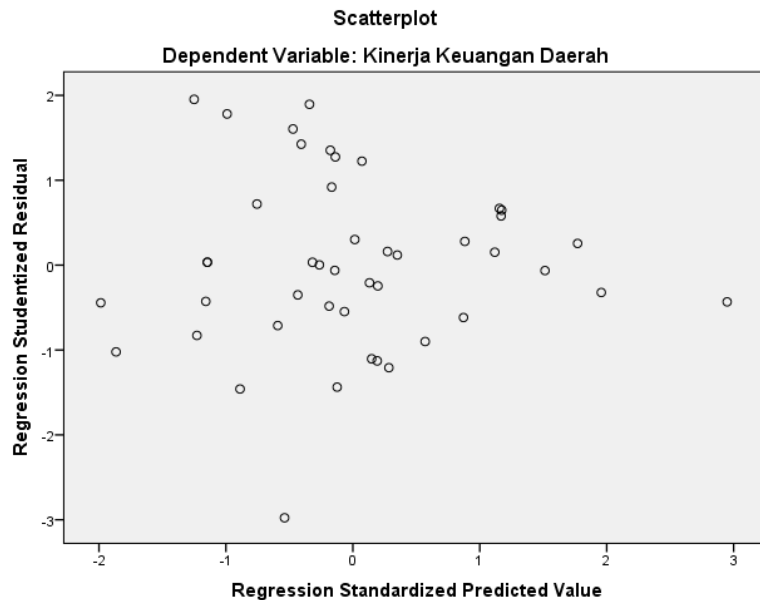
1. Hasil uji pada tabel 2 diperoleh hasil bahwa variabel rasio kemandirian daerah (X1) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,980 dan nilai VIF sebesar 1.020
2. Hasil uji pada tabel 3 diperoleh hasil bahwa variabel efektivitas PAD (X2) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,989 dan nilai VIF sebesar 1.011
3. Hasil uji pada tabel 4 diperoleh hasil bahwa variabel pengelolaan belanja daerah (X3) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,989 dan nilai VIF sebesar 1.011.
4. Pengambilan keputusan pada uji multikolinieritas jika nilai *tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

#### 4.2.6. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser (Ghozali, 2019). Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel

independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas**



*Sumber : Olah Data SPSS Ver 20, 2023*

Berdasarkan gambar 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola tertentu yang terbentuk dan titik-titik menyebar dengan merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan tersebarnya titik-titik tersebut, itu artinya tidak terdapat gejala heteroskedstisitas dalam penelitian ini.

### **4.3. Pengujian Hipotesis**

#### **4.3.1. Uji Kelayakan Model Uji R<sup>2</sup>**

Koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi pada model regresi dengan dua atau lebih variabel independen ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square (Adj, R<sup>2</sup>)*. (Ghozalli, 2019)



**Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 <sup>a</sup>	.231	.175	.02282

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Belanja Daerah, Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Olah Data SPSS Ver 20, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui besarnya koefisien korelasi ganda pada kolom R sebesar 0,481. Koefisien determinasinya pada kolom R Square menunjukkan angka 0,231. Kolom *Adjusted R Square* merupakan koefisien determinasi yang telah dikoreksi yaitu sebesar 0,175 atau sebesar 17,5%, yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah, efektivitas PAD dan pengelolaan belanja daerah memberikan kontribusi terhadap tingkat kinerja keuangan daerah sebesar 17,5%, sedangkan sisanya 82,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

#### 4.3.2. Uji F

Uji f digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah layak, dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika f hitung lebih besar dari f tabel atau probabilitas lebih kecil dari pada tingkat signifikansi ( $sig < 0,05$ ), maka model penelitian ini dapat digunakan atau sudah layak.
2. Jika f hitung lebih kecil dari f tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ( $sig > 0,05$ ) maka model tidak dapat digunakan atau tidak layak.

**Tabel 4.9 Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.006	3	.002	4.108	.012 <sup>b</sup>
Residual	.021	41	.001		
Total	.028	44			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Belanja Daerah, Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Daerah

Sumber : Olah Data SPSS Ver 20, 2023

Berdasarkan uji f yang telah dilakukan, pada tabel diatas diperoleh hasil bahwa uji f memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012 yang berarti  $sig\ 0,012 < 0,05$ . Hasil tersebut menjelaskan bahwa model dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

### 4.3.3. Uji Hipotesis

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk menjawab hipotesis dari penelitian yang telah dilakukan, dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak. (koefisien regresi signifikan)
2. Jika nilai signifikan  $< 0,05$ , maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan)

**Tabel 4.10 Hasil Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.924	.110		8.424	.000		
Rasio Kemandirian Daerah	-.026	.031	-.118	-.856	.397	.980	1.020
1 Efektivitas PAD	-.046	.014	-.448	3.252	.002	.989	1.011
Pengelolaan Belanja Daerah	.086	.111	.107	.773	.444	.989	1.011

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Olah Data SPSS Ver 20, 2023

1. Pada penelitian ini telah ditetapkan hipotesis pertama yaitu kemandirian daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Y). Dengan uji t yang telah dilakukan diperoleh hasil pada nilai signifikansi kemandirian daerah sebesar  $0,397 > 0,05$ . Maka hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak.
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu efektivitas PAD (X2) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Y). Dengan uji t yang telah dilakukan

diperoleh hasil pada nilai signifikansi efektivitas PAD sebesar  $0.002 < 0,05$ . Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu pengelolaan belanja daerah (X3) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Y). Dengan uji t yang telah dilakukan diperoleh hasil pada nilai signifikansi pengelolaan belanja daerah yaitu  $0,444 > 0,05$ . Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.

#### **4.4. Pembahasan**

##### **4.4.1. Pengaruh Kemandirian Daerah pada Kinerja Keuangan Daerah**

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu kemandirian daerah berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. Diperoleh hasil uji hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Data rasio kemandirian daerah se-Provinsi Lampung masih sangat rendah karena kurang dari 25% dengan pola hubungan Instruktif (peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, dan daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

Konsep stewardship menekankan pentingnya pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya publik. Dalam konteks kemandirian daerah, stewardship mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ini mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dengan efisien, efektif, dan transparan. Kemandirian daerah diyakini dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah secara positif. Namun, dalam penelitian ini, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Teori stewardship menekankan pentingnya otonomi lokal dalam pengambilan keputusan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi atau dominasi pemerintah pusat masih memiliki dampak yang signifikan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas kemandirian daerah dalam memengaruhi kinerja keuangan mereka. Pemerintah daerah mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya lokal dalam mengelola keuangannya, terutama

dalam hal pendapatan asli daerah yang dapat mereka hasilkan. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal meskipun memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Dengan demikian, walaupun berdasarkan teori stewardship kemandirian daerah diharapkan memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam analisis fenomena ini, seperti praktik pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, ketersediaan sumber daya lokal, dan interaksi dengan pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Anynda (2020) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh pada kinerja keuangan daerah, yang artinya tinggi rendahnya tingkat rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Namun Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hakiki, 2023) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan daerah, yang menunjukkan nilai rasio yang rendah berarti nilai tersebut berpengaruh terbalik kepada nilai kinerja keuangan daerah yang justru menjadi tinggi.

Penelitian ini menunjukkan bukti bahwa kemandirian daerah Kab/Kota se-Provinsi Lampung tidak berpengaruh pada Kinerja Keuangan Daerah Kab/Kota se-Provinsi Lampung, hal tersebut dikarenakan peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Lampung, dan pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Lampung tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara maksimal.

#### **4.4.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Kinerja Keuangan Daerah**

Bedasarkan pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. Diperoleh hasil uji hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Suatu daerah

yang memiliki tingkat pendapatan asli daerah yang tinggi maka tingkat kinerja keuangan juga akan semakin baik. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan mengalami peningkatan. Berdasarkan landasan teori yaitu semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Berdasarkan teori stewardship, konsep pengelolaan yang bertanggung jawab menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menggunakan pendapatan tersebut secara efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Dalam konteks penelitian ini, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Tingkat pendapatan asli daerah yang tinggi dihubungkan dengan tingkat kinerja keuangan yang juga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mampu menghasilkan pendapatan sendiri dalam jumlah yang besar cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja keuangan mereka.

Teori stewardship juga mendukung konsep bahwa semakin tinggi rasio efektivitas pengelolaan sumber daya, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan asli daerah. Efektivitas dalam pengelolaan sumber daya akan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah yang ada dan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Dengan demikian, analisis fenomena ini berdasarkan teori stewardship menyoroti pentingnya pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap pendapatan asli daerah dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal bagi pemerintah daerah. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah mereka akan cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Dengan tertibnya individu atau kelompok dalam hal

pembayaran pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, dan pendapatan daerah yang sah, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kinerja keuangan daerah berhasil mencapai pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anynda (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. Yang menyatakan bahwa perolehan pendapatan daerah telah optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini menunjukkan bukti bahwa efektifitas pendapatan asli daerah Kab/Kota se-Provinsi Lampung berpengaruh pada kinerja keuangan daerah Kab/Kota se-Provinsi Lampung, hal tersebut dikarenakan kemampuan pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Lampung dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan dan mengalami peningkatan.

#### **4.4.3. Pengaruh Pengelolaan Belanja Daerah pada Kinerja Keuangan Daerah**

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu pengelolaan belanja daerah berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. Diperoleh hasil uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Bahwa pengelolaan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Didapat data rasio pengelolaan belanja daerah mengungkapkan bahwa tingkat efisiensi belanja daerah di Provinsi Lampung yaitu kurang efisien karena sudah mencapai angka 98%.

Dalam konteks teori stewardship, pengelolaan belanja daerah yang efisien diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan daerah. Pengelolaan belanja yang baik akan memastikan alokasi sumber daya yang tepat dan penggunaan anggaran yang efisien untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Namun, hasil uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Data menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja daerah di Provinsi Lampung sudah mencapai 98%, yang berarti menurut kriteria efisiensi pengelolaan belanja daerah kurang efisien dalam pengelolaan belanja. Meskipun demikian, kinerja keuangan daerah masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti permasalahan implementasi mungkin lebih dominan dalam memengaruhi kinerja keuangan daerah.

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Anynda (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. Pengelolaan belanja menunjukkan jika kegiatan belanja yang terjadi di pemerintahan daerah mempunyai perbandingan antara belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sebesar dari total pendapatan yang masuk di anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat secara optimal menekan biaya realisasi. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Defitri 2021) yang menyatakan pengelolaan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, hal ini menunjukkan bahwa besaran belanja daerah yang dikeluarkan tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dipengaruhi oleh penggunaan belanja untuk hal-hal yang sifatnya tidak produktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tidak berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efisiensi dalam penggunaan belanja serta besarnya alokasi belanja yang tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bahwa terdapat faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan dalam analisis fenomena ini. Salah satunya adalah viralnya kasus Bima yang menjadi sorotan warganet pada

tanggal 16 April 2023, yang melibatkan kritikan dari seorang pelajar Australia terhadap berbagai sektor di provinsi tersebut dan respons negatif dari pemerintah setempat. Fenomena ini menyoroti kompleksitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan belanja daerah. Di satu sisi, kritikan tersebut terkait infrastruktur. Berdasarkan kasus tersebut, telah terbukti bahwa pengelolaan belanja kurang efisien dalam mencapai kinerja keuangan yang baik.